

Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dari Pinggiran ke Pusat: Studi Kasus Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Peran Perempuan Merumuskan Kebijakan Publik yang Berkeadilan

Women's Leadership Participation from the Margins to the Center: Case Study of Sekolah Perempuan in Enhancing Women's Role in Formulating Equitable Public Policy

Yusnaningsi Kasim & Indri Sri Sembadra

Institut KAPAL Perempuan
Jakarta Selatan, Indonesia

indri@kapalperempuan.org

Kronologi Naskah: diterima 15 Maret 2025, direvisi 25 April 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

Abstract

Women remain on the margins of public decision-making, especially in development planning and budgeting forums where their voices and interests are ignored. An equitable development, however, requires the active participation of marginalized groups, including poor women, female heads of households, survivors of violence, ethnic minorities, indigenous women, those in remote or disaster-affected areas, gender minorities and individuals with disabilities. These groups face systemic barriers to participation, as men are often perceived to represent the collective voice of their communities. Therefore, women's leadership needs to be established. To overcome this marginalization, women's leadership must be actively developed. Based on KAPAL Perempuan's experience in empowering women through Sekolah Perempuan, this paper explores how grassroots organizing and critical education—with the approach of the Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) framework—enhances women's agency, critical consciousness, and leadership. Data collection for this paper utilized interview methodology and literature review. By developing a GEDSI perspective, marginalized women can influence public policies to become more gender equitable and inclusive, ultimately bridging the gap in their participation in development planning and decision-making. Recommendations include integrating the GEDSI approach in local development policies and supporting capacity building for women's participation and community-based empowerment to reach more marginalized groups.

Keywords: Women's Participation and Leadership, Sekolah Perempuan, KAPAL Perempuan, GEDSI, gender equality, critical education

Abstrak

Perempuan masih berada di pinggiran pengambilan keputusan publik, terutama dalam forum perencanaan pembangunan dan penganggaran ketika suara dan kepentingan mereka diabaikan. Pembangunan yang adil, bagaimanapun memerlukan partisipasi aktif dari kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan miskin, kepala rumah tangga perempuan, penyintas kekerasan, etnis minoritas, perempuan adat, mereka yang berada di daerah terpencil atau terkena dampak bencana, minoritas gender, dan individu penyandang disabilitas. Kelompok-kelompok ini menghadapi hambatan sistemik untuk berpartisipasi karena laki-laki sering dianggap mewakili suara kolektif komunitas mereka. Oleh karenanya, kepemimpinan perempuan perlu dibangun. Untuk mengatasi peminggiran ini, kepemimpinan perempuan harus aktif dikembangkan. Berdasarkan pengalaman Institut KAPAL Perempuan dalam memberdayakan perempuan melalui Sekolah Perempuan, tulisan ini mengeksplorasi bagaimana pengorganisasian akar rumput dan pendidikan kritis—dengan pendekatan kerangka kerja Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)—meningkatkan agensi perempuan, kesadaran kritis, dan kepemimpinan. Pengambilan data untuk tulisan ini menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Dengan menumbuhkan perspektif GEDSI, perempuan yang terpinggirkan dapat memengaruhi kebijakan publik untuk menjadi lebih adil gender dan inklusif yang pada akhirnya menjembatani kesenjangan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Rekomendasi yang diajukan meliputi integrasi pendekatan GEDSI dalam kebijakan pembangunan daerah dan dukungan peningkatan kapasitas partisipasi perempuan dan pemberdayaan berbasis komunitas supaya dapat menjangkau lebih banyak kelompok marginal.

Kata kunci: Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan, Sekolah Perempuan, KAPAL Perempuan, GEDSI, kesetaraan gender, pendidikan kritis

Pendahuluan

Data kependudukan menunjukkan bahwa separuh jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Statistik BPS menunjukkan, jumlah penduduk perempuan

di tahun 2023 sebanyak 137.909.400 jiwa dan laki-laki sebanyak 140.786.800 jiwa. Jumlah penduduk perempuan miskin di Indonesia juga lebih tinggi dari laki-laki. Laporan BPS mencatat terdapat sebanyak 9,49

persen penduduk perempuan miskin di tahun 2023 dibanding laki-laki 9,23 persen. Bahkan di tahun 2024, kesenjangan penduduk perempuan dan laki-laki miskin tersebut makin lebar, yakni perempuan miskin berada di 9,20 persen dan laki-laki 8,86 persen (BPS 2023). Dalam konstruksi patriarki, dampak kemiskinan perempuan berkelindan erat dengan berbagai masalah lainnya, seperti rendahnya pendidikan perempuan, buruknya kesehatan reproduksi perempuan, perkawinan paksa di usia anak, terbatasnya pengambilan keputusan perempuan, dan isu lainnya.

Wajah kemiskinan perempuan ini, oleh Kumurur didefinisikan sebagai feminisasi kemiskinan atau pemiskinan perempuan—mengalami penderitaan kemiskinan karena identitas gendernya atau ketidaksetaraan peran-peran gendernya. Kumurur juga menjelaskan bahwa dalam proses pemiskinan terhadap perempuan terjadi pembiaran dalam kurun waktu yang panjang (Kumurur 2010) seperti dalam kutipan berikut:

“Berdasarkan dokumentasi Ester Boserup dalam Shiva (2005, hlm. 83), ternyata pemiskinan perempuan semakin meningkat ketika diterapkan peraturan kolonial; di mana pembuat aturan tersebut telah sekian ratus tahun menaklukkan dan menempatkan kaum perempuan ke dalam posisi tidak punya keahlian (*skill*), tidak terdidik, mendiskriminasi akses perempuan terhadap tanah, teknologi dan lapangan kerja”.

Perempuan juga hidup dengan berbagai identitas yang beragam. Dalam strata sosial patriarki, identitas perempuan memengaruhi kehidupan sosialnya. Perempuan kepala keluarga, perempuan dengan etnis minoritas, perempuan adat, perempuan disabilitas, perempuan lansia, anak perempuan, perempuan korban kekerasan, perempuan dengan identitas gender minoritas, perempuan di wilayah terpencil dan perempuan di wilayah bencana, memiliki masalah khusus yang berkaitan dengan kompleksitas situasinya tersebut.

Lingkar kemiskinan dan kekerasan yang terjadi pada perempuan, salah satunya dialami oleh Sukaesih, perempuan korban perkawinan anak di Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sejak lahir, ia diasuh oleh bibinya karena ibunya meninggal saat melahirkannya dan bapaknya meninggalkannya saat menikah lagi. Ia tumbuh di sebuah kontrakan kecil bersama tujuh anggota keluarga lainnya. Di usia 10 tahun, ia membantu bibinya berjualan makanan dan menjadi buruh cuci keluarga dengan upah 25 ribu per bulan. Kondisi ini membuatnya hanya dapat menikmati pendidikan sampai kelas 4 Sekolah Dasar.

Pada usia 15 tahun, ia menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Kondisi ekonomi keluarganya membuatnya terpaksa bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran di Arab Saudi. Selama dua tahun bekerja, penghasilannya selalu rutin dikirimkan kepada suaminya. Saat ia kembali ke Indonesia, suaminya ternyata berselingkuh. Ia kemudian bercerai. Untuk bertahan hidup, ia menjadi buruh cuci piring di warung makan kecil. Namun, ia kembali mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ia pun bercerai lagi. Ternyata, sejak lahir ia tidak memiliki dokumen kependudukan apa pun. Begitu juga dengan perkawinannya yang selalu tidak tercatat. Hal ini termasuk keberangkatannya ke Arab Saudi yang tidak berdokumen. Ketidadaan dokumen kependudukan ini membuatnya tidak dapat mengakses jaminan sosial dan program perlindungan sosial lainnya. Tahun 2020 akhirnya ia dibantu oleh Sekolah Perempuan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI).

Pertanyaannya, bagaimana kompleksitas dan keragaman situasi perempuan tersebut “ditangkap” oleh kebijakan publik? Bagaimana setiap suara, tanpa meninggalkan satu pun dari perempuan marginal, masuk ke dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan publik? Bagaimana setiap kemarginalan perempuan diakui dan didokumentasikan dalam kebijakan perencanaan pembangunan?

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik merupakan mandat regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 mengatur secara jelas tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) ini secara khusus mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah; perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah; pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah; penyelenggaraan pelayanan publik; dan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Partisipasi perempuan juga demikian. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menugaskan menteri hingga bupati/walikota untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional termasuk melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Meski demikian, perintah regulasi tidak serta-merta membuat pemerintah melibatkan perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang marginal.

Ruang kebijakan publik menjadi arena pertarungan gagasan mengenai masalah kebijakan yang akan diputuskan bersama. Oleh karena itu, kehadiran warga negara dalam ruang-ruang tersebut menjadi agenda penting dalam membangun demokrasi partisipasi masyarakat sipil. Selain itu, para pelaku kebijakan memiliki interpretasi yang berbeda terhadap kebijakan tersebut. Dunn menjelaskan bahwa, "masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yang khusus, yaitu pada individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka memengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah (Dunn 2003, hlm. 111).

Absennya perempuan dan kelompok marginal dari ruang-ruang ini membuat kepentingan dan kebutuhan mereka hilang dari perspektif dan agenda kebijakan pembangunan. Buruknya, argumentasi yang selalu dibangun dalam pengabaian representasi perempuan dalam ruang kebijakan ini adalah bahwa perempuan telah terwakili oleh suaminya sebagai kepala keluarga. Partisipasi keluarga, yang diasosiasikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat, perempuan berada di dalamnya, dianggap telah cukup merepresentasikan suara masyarakat. Kenyataan di lapangan, ruang "keluarga" justru sering kali menjadi pembungkaman pertama suara dan aspirasi perempuan. Bahkan ketika kelompok perempuan "dihadirkan", mereka sering kali luput merepresentasikan perempuan dari kelompok marginal dengan beragam kemarginalannya.

Perlu kita tekankan bahwa perempuan memiliki pengalaman yang unik dan berbeda karena ketubuhannya. Pengalaman tersebut penting untuk disuarakan oleh perempuan sendiri. Oleh karena itu, mekanisme representasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan kebijakan publik perlu berpihak pada kepentingan perempuan yang berbeda tersebut, apalagi bias terhadap apa yang dibutuhkan perempuan sering kali membuat kebijakan yang dihasilkan meleset jauh dari apa yang dirasakan oleh perempuan. Dalam perumusan kebijakan publik, Dye menjelaskan bahwa kebijakan akan mengikuti kepentingan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh, dalam hal ini, Dye menegaskan "*public policy may also be viewed as the preferences and values of a governing elite*" (Dye 2016, hlm. 17–18).

Perlu adanya upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat domestik-keluarga maupun kebijakan publik, yang mensyaratkan kepemimpinan perempuan yang

kuat. Kepemimpinan perempuan memungkinkan perempuan untuk mengemukakan gagasan dari sudut pandangnya, menegosiasikan kepentingannya dengan kepentingan yang lain, bahkan memutuskan pilihan-pilihan terbaiknya.

Tulisan ini membahas kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik yang dibangun melalui pemberdayaan akar rumput berbasis pengorganisasian dan pendidikan kritis dengan perspektif gender dan inklusi sosial. Institut KAPAL Perempuan mengembangkan Sekolah Perempuan menggunakan metodologi feminisme untuk memperkuat kepemimpinan perempuan. Beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya juga menggunakan pendekatan serupa. Proses ini memungkinkan perempuan memengaruhi kebijakan publik yang berkeadilan gender dan inklusif, baik melalui mekanisme perencanaan pembangunan maupun forum-forum pengambilan keputusan termasuk forum-forum adat. Tulisan ini juga mengulas kebijakan, program, layanan, dan alokasi anggaran yang dihasilkan dari partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, serta mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dan memberikan rekomendasi penguatan kepemimpinan dan partisipasi (politik) pembangunan perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara, yang difokuskan pada hasil pengorganisasian dan advokasi yang dikembangkan oleh Institut KAPAL Perempuan selama 25 tahun. Studi ini menelusuri berbagai praktik pemberdayaan perempuan, pendidikan kritis, dan advokasi dalam mendorong partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan pembangunan. Penelitian ini juga menggunakan berbagai literatur terkait kepemimpinan perempuan, pendidikan kritis feminis, konsep pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan dan partisipasi perempuan yang bermakna dalam mekanisme perencanaan pembangunan.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori dan kerangka analisis feminisme terkait partisipasi dan kepemimpinan perempuan, serta kerangka kerja Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Analisis GEDSI merupakan pendekatan yang digunakan oleh pembuat kebijakan, perencana, akademisi, aktivis, dan pelaksana pembangunan, untuk memastikan bahwa hak semua

kelompok, termasuk perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya diakui secara setara dalam proses pembangunan.

GEDSI merupakan strategi dan pendekatan pembangunan untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis jenis kelamin, gender, disabilitas, dan identitas sosial lainnya (misalnya, umur, suku, agama/keyakinan, ras, antar golongan, dan lokasi geografis) agar semua orang dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol atas sumber daya dan layanan publik, serta manfaat pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan (INKLUSI 2024, hlm. 2)

Analisis lima level pemberdayaan dari Sara Longwe, yaitu kesejahteraan (*welfare*), akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol, digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengontrol kebijakan yang berdampak pada kehidupan perempuan dan kelompok marginal lainnya (Longwe 1995). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mendorong kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Sebagai bagian dari pengumpulan data, penelitian ini melakukan wawancara terhadap 9 orang yang terdiri dari pemimpin Sekolah Perempuan, fasilitator komunitas, dan satu Kepala Desa dari wilayah dampingan KAPAL Perempuan di Sulawesi Selatan, NTT, NTB, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Selain itu, peneliti juga menggali temuan dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengenai partisipasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam Musrenbang di 262 kabupaten/kota untuk melihat tingkat keterlibatan dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses perencanaan pembangunan.

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis melalui pendekatan beberapa teori feminis terkait dengan partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik menjadi momen penting yang membuka peluang bagi mereka untuk berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan perempuan secara lebih efektif. Dalam perspektif feminisme liberal, kesetaraan hak politik bagi perempuan dianggap sebagai elemen kunci dalam mewujudkan representasi yang demokratis. Feminisme liberal menekankan bahwa perempuan seharusnya memiliki hak setara dalam ranah politik dan mulai mempertanyakan hak-hak mereka. Hal ini tercermin

dalam Deklarasi Seneca Falls tahun 1848, yang dihadiri oleh 300 orang dan menyerukan reformasi terhadap hukum perkawinan, perceraian, kepemilikan properti, serta hak atas anak. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya hak perempuan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam ruang publik. Sejak saat ini, kesadaran akan peran perempuan dalam politik dan ruang publik semakin meningkat dan menuntut hak-haknya (Arivia 2018).

Namun, seperti yang disoroti Nancy Fraser, kehadiran perempuan dalam ruang musyawarah tidak selalu menjamin bahwa suara mereka didengar. Hambatan informal seperti dominasi laki-laki dalam percakapan dan pengabaian terhadap intervensi perempuan sering kali menghambat partisipasi yang setara. Jane Mansbridge juga menekankan bahwa musyawarah bisa menjadi “topeng bagi dominasi,” bahwa kelompok subordinat sulit mengartikulasikan kepentingan mereka atau bahkan diabaikan ketika berbicara. Dalam konteks layanan publik, ini berarti kebutuhan perempuan sering kali tidak menjadi prioritas, seperti layanan pengaduan kekerasan atau edukasi kesehatan reproduksi yang masih dianggap sekunder. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan harus diikuti dengan mekanisme yang memastikan suara mereka benar-benar memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kelompok rentan (Fraser 1990).

“Sejalan dengan tipologi partisipasi yang dikemukakan oleh Andrea Cornwall, partisipasi interaktif (partisipasi bermakna) bukan sekadar sarana untuk mencapai tujuan pembangunan, tetapi merupakan hak yang harus diakui. Dalam pendekatan pembangunan partisipatif, keterlibatan perempuan dalam analisis, pengembangan rencana aksi, dan penguatan lembaga lokal memungkinkan mereka untuk mengambil kendali atas keputusan serta menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunitas” (Cornwall 2008, hlm. 272).

Perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal dan terpinggirkan, masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengambilan keputusan publik. Meskipun regulasi telah mengamankan partisipasi masyarakat, implementasinya masih terbatas dan perempuan serta kelompok marginal lainnya sering kali tidak diakui sebagai aktor politik dan sosial yang berhak bersuara. Tulisan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengorganisasian akar rumput

dan pendidikan kritis seperti yang dikembangkan oleh Institut KAPAL Perempuan melalui Sekolah Perempuan, mampu meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di ruang kebijakan.

Dengan menggunakan pendekatan perspektif GEDSI, perempuan dan kelompok marginal lainnya tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga mampu memengaruhi kebijakan agar lebih adil dan inklusif. Pengalaman Sekolah Perempuan menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki akses terhadap pendidikan kritis dan ruang-ruang partisipasi, mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam komunitasnya.

Kepemimpinan Perempuan

Batliwala dalam bukunya *Feminist Leadership for Social Transformation: Clearing the Conceptual Cloud* menjelaskan kepemimpinan sebagai serangkaian tindakan dan proses, yang dilakukan oleh perseorangan dengan karakter, pengetahuan, dan integritas, yang memiliki kapasitas untuk menciptakan sebuah visi untuk perubahan, menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk turut serta dalam mencapai visi tersebut, mengembangkan ide, serta strategi yang memandu dan memberdayakan orang lain untuk bekerja menuju perubahan yang dimaksud, serta membuat keputusan kritis yang menjamin tercapainya tujuan (Batliwala 2010).

Serupa dengan Batliwala, dalam refleksi Institut KAPAL Perempuan mengenai kepemimpinan perempuan, mendefinisikan kepemimpinan perempuan sebagai kemampuan dari perempuan untuk memengaruhi kelompok atau pengikutnya mencapai tujuan tertentu (KAPAL Perempuan 2010). Definisi kepemimpinan perempuan ini dibangun dari pertanyaan tentang bagaimana mendefinisikan kepemimpinan dari perspektif perempuan yang masih berada dalam norma-norma patriarki. Definisi ini menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak terbatas pada serangkaian proses perempuan mengambil keputusan tetapi juga menjelaskan bagaimana perempuan mendefinisikan tujuannya dalam proses-proses pengambilan keputusan tersebut. Tujuan kepemimpinan perempuan adalah memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan, dan keadilan bagi perempuan. Dengan definisi ini, kepemimpinan perempuan dapat dimaknai sebagai upaya perjuangan perempuan pemimpin untuk meminta kembali hak-haknya yang selama ini terampas.

Berdasarkan pengalaman Institut KAPAL Perempuan, kepemimpinan perempuan dibangun melalui sebuah proses yang panjang. Konsistensi terhadap proses ini menjadi penting karena yang diangkat dari kepemimpinan perempuan adalah kesadaran kritis perempuan. Kesadaran kritis ini menjadi jendela pertama untuk mengungkit instrumen-instrumen kepemimpinan perempuan lainnya; komitmen, keberanian, empati, ketahanan berjuang, dan lainnya.

Selama ini, kepemimpinan perempuan diredam oleh nilai-nilai patriarki (Batliwala 2010). Masyarakat dan (bahkan terkadang) perempuan sendiri percaya bahwa kepemimpinan secara kodrati hanya dimiliki oleh laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik-publik, pada tingkat tertentu, dianggap sebagai perwujudan ekspresi aktualisasi peran-peran publik perempuan, yang tidak berlaku sama ketika ia kembali ke ruang-ruang domestiknya (Suryakusuma 2011). Di ruang domestiknya, laki-laki kembali menerima kekuasaannya sebagai pemimpin. Pada akhirnya, ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan perempuan membuat perempuan pemimpin melakukan upaya yang lebih keras daripada laki-laki untuk (sekadar) membuktikannya.

Dalam membangun kepemimpinan perempuan, khususnya perempuan marginal, Institut KAPAL Perempuan mengembangkan sebuah model pemberdayaan perempuan melalui pengorganisasian dan pendidikan kritis berperspektif gender dan inklusi sosial. Pengorganisasian dan pendidikan kritis yang dilakukan merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisah. Pendidikan kritis merupakan bagian penting dari sebuah proses pengorganisasian komunitas sebab di dalam pendidikan kritis, perubahan-perubahan yang dihasilkan tidak hanya terjadi di tingkat individu tetapi juga akan mengubah norma, budaya bahkan tatanan sosial di dalam suatu masyarakat.

Pendidikan Kritis Feminis dalam Sekolah Perempuan

Institut KAPAL Perempuan mengembangkan model pendidikan kritis feminis dari serangkaian perjalanannya merefleksikan teori-teori pendidikan kritis yang telah ada sejak 1970-an. Dari Paulo Freire, dalam *Critical Pedagogy*, Institut KAPAL Perempuan merefleksikan bagaimana pendidikan kritis mampu membangkitkan kesadaran kritis warga terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitarnya. Namun, Freire lupa menggunakan perspektif gender dalam teorinya. Abha

Baiya dan Kalyani Menon Sen, menjelaskan bahwa Freire, dalam *Pedagogy of the Oppressed*, tidak membedakan perempuan sebagai manusia tunggal, dari laki-laki, yang oleh karenanya kebutuhan perempuan yang berbeda (karena konstruksi sosial) tidak dapat didefinisikan (Bhaiya & Sen 1996).

Sunardi mendefinisikan pendidikan kritis sebagai proses penyadaran masyarakat agar mampu membebaskan diri dari situasi penindasan (Sunardi 1998). Sementara itu, Faqih dalam *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis* menegaskan bahwa, dalam perspektif pendidikan kritis, pendidikan ditujukan untuk “menciptakan ruang agar masyarakat bersikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil” (Faqih, 2001, hlm. 22). Konsep-konsep tersebut menjadi dasar bagi upaya pembebasan perempuan dari norma gender dan budaya patriarki yang mengakar. Upaya ini mencakup pembangunan kesadaran kritis perempuan agar dapat melepaskan diri dari diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, serta beban domestik yang mengekang. Dengan menggunakan perspektif feminisme, Institut KAPAL Perempuan memahami bahwa Pendidikan Kritis Feminis merupakan “model pendidikan yang mendasarkan diri pada siklus aksi refleksi, menggunakan pendekatan partisipatoris yang bersifat penguatan, membuka ruang untuk mereka yang tidak pernah didengar suaranya, dan yang terpenting mendasarkan diri pada pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan yang otentik sekaligus dapat mempercepat proses penyadaran akan ketertindasan perempuan (Muchtar 2005, h. 4).

Feminisme menjadi landasan ideologi Institut KAPAL Perempuan dalam mengembangkan pendidikan kritis bagi perempuan, khususnya perempuan marginal dan mewarnai konsep, tujuan, metodologi, dan ukuran-ukuran perubahan yang akan dihasilkan dari pendidikan kritis tersebut. Pengalaman perempuan, menjadi pusat rujukan untuk melakukan proses analisis, memicu kepekaan, menginternalisasi kesadaran atas masalah dan menggali agensi perubahan yang dimiliki perempuan.

Mengangkat persoalan agensi perempuan bukanlah hal yang mudah. Parker, menjelaskan bahwa agensi perempuan lahir dari situasi perempuan yang tertindas, ia menyebutnya *subaltern* atau posisi terbawah—dalam konteks terpinggirkan. Situasi penindasan ini mengantarkan perempuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sebagai bentuk

perlawanannya. Dalam buku *The Agency of Women in Asia*, Parker menjelaskan:

Individual agency has often been opposed to forces of oppression and exploitation, institutional power, social structures (such as class) and the power of hegemonic discourses or ideologies. In the sociological formulation most often quoted until recently, “agency” was pitted against structure. In this formulation, agency is the action of the individual who seeks to escape the constraints of society, and is often taken as “free will” (Parker 2015, hlm. 4).

Oleh karena itu, pendidikan kritis feminis yang menasar pada kelompok-kelompok perempuan miskin dan marginal menjadi relevan karena di dalam proses penyadarannya berbasis pada pengalaman ketertindasannya sebagai perempuan, sekaligus warga negara. Namun, Parker juga mengingatkan bahwa agensi perempuan atau keputusan perempuan mengambil tindakan, dilatarbelakangi oleh berbagai konteks yang melingkupi kehidupan perempuan. Ia mengatakan, “*we need to ask, in what ways might agency be demonstrated in different societies or even different sub-cultures or different circumstances*” (Parker 2015, hlm. 12). Ini menjadi catatan penting bagi pendidikan kritis feminis untuk mengkontekstualisasi proses-proses penyadarannya berbasis pengalaman perempuan yang beragam.

Untuk mengorganisir komunitas sekaligus melakukan pendidikan kritis feminis, Institut KAPAL Perempuan mengembangkan Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan menjadi wadah bagi perempuan miskin dan marginal membangun kapasitas kepemimpinannya. Di Sekolah Perempuan, pendidikan kritis feminis dikembangkan melalui Pendidikan Adil Gender (PAG). Institut KAPAL Perempuan meletakkan lima prinsip penting dalam PAG (Muchtar et al. 2006). Pertama, pengalaman perempuan merupakan sumber pengetahuan karena pengalaman perempuan diakui setara dengan pengetahuan lainnya. Dalam praktiknya, pengalaman perempuan menjadi sumber data untuk memetakan situasi dan kondisi komunitasnya. Hal ini sejalan dengan semangat feminisme yang menantang apa yang disebut sebagai objektivitas yaitu ruang-ruang pengetahuan diinterpretasikan oleh subjektivitas laki-laki.

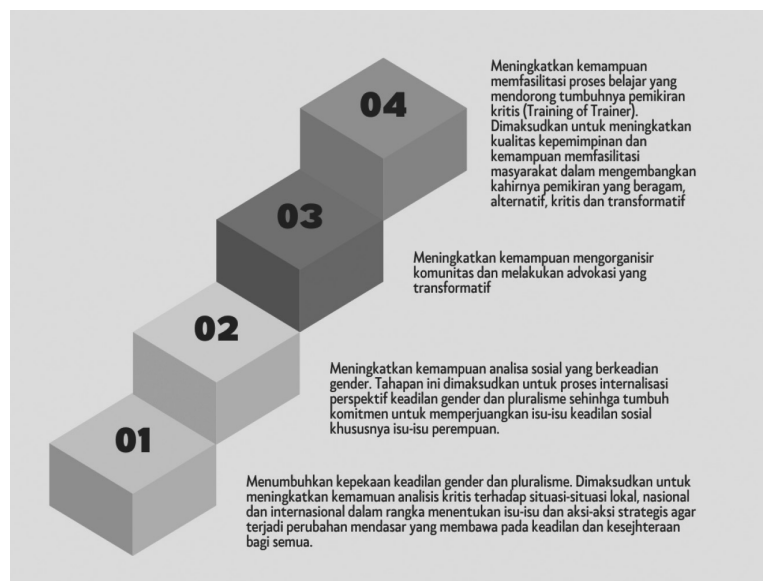
Kedua, proses aksi refleksi yang terus menerus. Dalam PAG, perempuan miskin dan marginal didorong untuk mulai berani melakukan aksi untuk menyuarkan perlawanannya, baik di lingkup keluarga terkecilnya hingga komunitas yang lebih luas. Aksi-aksi yang dilakukan didasarkan pada kesadaran dan cara

pandangannya yang baru, yang lahir dari refleksinya terhadap sebab-sebab penindasan yang dialaminya. Ketiga, mendorong perempuan untuk melihat dirinya sebagai pembuat sejarah dan tidak hanya sebagai objek pasif dari proses bersejarah. PAG menstimulasi kesadaran perempuan bahwa pengetahuan yang dimilikinya sepanjang siklus kehidupannya akan berkontribusi pada sejarah. Oleh karenanya, mengangkat suara-suara perempuan menjadi cara agar sejarah diwarnai oleh perspektif perempuan.

Keempat, menantang pandangan patriarki atas tubuh perempuan. Tubuh dan seksualitas perempuan sering kali menjadi ruang pembicaraan yang dianggap sensitif karena selama ini ditempatkan sebagai hal yang sifatnya tabu untuk diungkap. PAG membuka ruang-ruang dialog yang kritis untuk mempertanyakan tentang penundukan patriarki terhadap tubuh perempuan. Beberapa tema besar, yakni seks, seksualitas, dan kesehatan alat reproduksi perempuan;

sunat perempuan; perkawinan paksa dan perkawinan anak; identitas gender dan orientasi seksual; dan tema lainnya, merupakan isu-isu yang didiskusikan secara terbuka untuk membongkar mitos yang selama ini mengungkung perempuan.

Kelima, mendobrak pemisahan wilayah domestik dan publik serta pengkotakan yang menciptakan hierarki yang menganggap atribut feminin lebih rendah nilainya. Salah satu pandangan yang sering kali mematahkan kepemimpinan perempuan adalah pandangan tentang rasionalitas perempuan. Pandangan misoginis ini membuat perempuan bekerja dua kali lipat, dibanding laki-laki, untuk membuktikan kepemimpinannya. Dalam PAG, kesadaran perempuan diungkit untuk melawan pengecilan makna rasionalitas dan emosionalitas yang dimiliki baik oleh perempuan maupun laki-laki. Demikian juga dengan pengkotakan nilai-nilai yang lain: otak kiri-otak kanan, domestik-publik, dan lainnya.



Gambar 1: Tahapan Pendidikan Kritis Feminis dalam Sekolah Perempuan

Sumber: Profil Sekolah Perempuan: Mengembangkan Kesadaran Kritis, Kepemimpinan Perempuan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender, Institut KAPAL Perempuan, 2017.

Untuk memastikan prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, PAG menggunakan berbagai metode pendidikan yang interaktif untuk mendorong keterbukaan dan kepekaan serta dialogis. Metode-metode yang dikembangkan dalam PAG di antaranya adalah Sungai Kehidupan (*Rivers of Life*), Silsilah Keluarga dari Garis Keturunan Perempuan, Diorama, *Role Play* (Bermain Peran) Sejarah Gerakan Perempuan, menggambar, analisis film, analisis lagu, dan metode lainnya yang sesuai dengan situasi ketika PAG diterapkan. Metode-metode ini tidak

hanya membantu perempuan menggali kesadaran kritis mereka, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk merefleksikan pengalaman, membangun keberanian, serta mengartikulasikan gagasan dan tuntutan mereka.

PAG mendorong perubahan dalam diri perempuan. Muchtar et al. (2006), menyebutkan empat aspek perubahan yang akan terjadi setelah mengikuti PAG. Pertama, aspek kesadaran. PAG memungkinkan perempuan untuk menyadari bahwa masalah-masalah

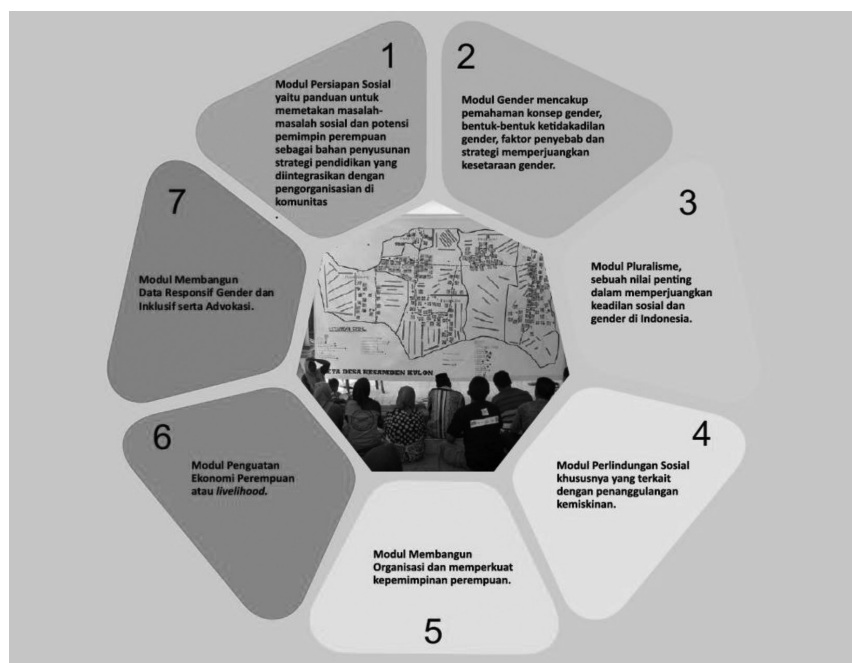
yang muncul dalam kehidupannya disebabkan karena identitas gendernya. Kesadaran lainnya adalah bahwa ketidakadilan gender yang dialaminya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dibutuhkan strategi kepemimpinan perempuan yang kuat untuk mengubahnya. Aspek ini akan membuat perempuan terus menerus mempertanyakan akar masalah penindasannya. Kedua, aspek komitmen. Kesadaran akan penindasan yang dialaminya akan mendorong perempuan memiliki komitmen untuk melakukan perubahan. Pada tahap ini, perempuan juga kemungkinan akan menggugat dan berhadapan dengan cara pandangnya sendiri yang selama ini terkonstruksi secara sosial dalam norma-norma gender.

Ketiga, aspek politik. Ruang politik seolah jauh dari kehidupan perempuan karena ruang politik diidentikkan dengan proses-proses formal pengambilan keputusan publik. Dasar pemahaman dalam berbagai teori feminisme menempatkan ranah domestik sebagai ruang politik—ruang bagi perempuan mengambil keputusan atas peran-peran yang harus dilakukannya. Begitu juga keputusan mengenai tubuh dan seksualitas perempuan yang dianggap sebagai ranah privat perempuan. PAG mendorong pengakuan berbagai masalah perempuan sebagai masalah sosial-politik, artinya perjuangan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan gender adalah perjuangan politik. Keempat, aspek budaya. Perubahan pada perempuan mulai dari dirinya, di

tingkat keluarga dan komunitas, pada akhirnya akan mendorong terjadinya perubahan budaya dan sejarah baru yang lebih terbuka, tidak tunggal, dan meletakkan nilai-nilai yang setara dan pluralis menjadi norma sosial sehari-hari.

Sejarah Sekolah Perempuan

Sekolah Perempuan diinisiasi Institut KAPAL Perempuan sejak tahun 2000. Dimulai dari Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kurang lebih 50 perempuan miskin menjadi anggota Sekolah Perempuan kala itu. Mereka mengikuti PAG secara rutin setiap minggu. Mereka belajar di gang sempit depan rumah warga karena tidak ada fasilitas bangunan yang dapat mereka gunakan untuk belajar. Beralas terpal atau tikar, mereka belajar tentang konsep gender, kesehatan reproduksi perempuan, kepemimpinan perempuan, membangun organisasi perempuan, dan mengembangkan koperasi. Dalam perjalanannya, PAG mulai dikombinasikan dengan belajar membaca dan menulis karena merespon tingginya minat perempuan yang ingin masuk Sekolah Perempuan namun tidak dapat membaca dan menulis. Di tahap inilah, Institut KAPAL Perempuan mulai mengombinasikan antara penguatan perspektif gender dengan penguatan keahlian hidup (*life skill*), dalam hal ini adalah membaca dan menulis.



Gambar 2: Modul Pendidikan Kritis Feminis dalam Sekolah Perempuan

Sumber: Profil Sekolah Perempuan: Mengembangkan Kesadaran Kritis, Kepemimpinan Perempuan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Institut KAPAL Perempuan, 2017.

Integrasi metode membaca dan menulis dalam materi-materi PAG membantu anggota Sekolah Perempuan yang tidak dapat membaca dan menulis, menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Ibu Daren, salah satu anggota Sekolah Perempuan yang selama hidupnya tidak dapat membaca, mengatakan bahwa ia lebih berani dan percaya diri untuk bepergian karena sudah dapat membaca jalur transportasi publik yang digunakannya. Proses-proses PAG juga pada akhirnya membuat Sekolah Perempuan berani melakukan berbagai aksi mengadvokasi RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Dari wilayah miskin kota, tahun 2005 PAG diterapkan di Pulau Nain, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebuah tantangan baru bagi PAG karena diterapkan di sebuah kepulauan terpencil yang sangat sulit akses informasi, transportasi, dan fasilitas lainnya. Pulau Nain dihuni oleh dua suku, yaitu Suku Bajo dan Suku Sangihe Talaud. Perempuan di Pulau Nain, khususnya dari suku Bajo, sangat percaya pada mitos termasuk dalam hal pengobatan tradisional sehingga mereka jarang mengakses layanan pengobatan medis. Fasilitas kesehatan di pulau tersebut juga tidak berfungsi. Layanan kesehatan setaraf Puskesmas ada di pulau lainnya. Alternatif lainnya adalah mereka ke daratan Kota Manado yang jarak tempuhnya sekitar 2 jam menggunakan perahu kayu sebagai transportasi publik, untuk mendapatkan layanan rumah sakit, klinik, atau dokter spesialis. Akibatnya, perempuan di Pulau Nain memiliki beragam masalah kesehatan reproduksi. PAG yang diterapkan di Pulau Nain tersebut telah mendorong kesadaran perempuan tentang kesehatan reproduksinya. PAG telah mengubah perspektif mereka tentang pentingnya memeriksakan diri pada layanan-layanan medis dan mendesak tersedianya layanan kesehatan di pulau tersebut.

Sekolah Perempuan kemudian meluas di berbagai wilayah. Pada tahun 2012, Sekolah Perempuan berkembang di 24 desa di 8 kabupaten/kota di 6 provinsi. Konteks wilayahnya makin beragam; desa miskin kepulauan dan pesisir, wilayah kering, desa miskin rawan bencana alam, desa miskin yang terjadi penguatan identitas berbasis nilai-nilai konservatif, wilayah dengan kerusakan lingkungan, wilayah pertanian dan industri, serta wilayah adat. Kontekstualisasi pembelajaran PAG pada akhirnya juga semakin beragam. Sekolah Perempuan mulai menggunakan banyak strategi agar dapat merespon situasi wilayah tersebut.

Salah satu strategi yang dikembangkan di Sekolah Perempuan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

adalah membuat "Kelas Petukangan" untuk melawan domestikasi perempuan pulau. Kelas Petukangan, menjadi cara bagi Sekolah Perempuan untuk menyampaikan bahwa perempuan juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini hanya dilekatkan kepada laki-laki. Dalam Kelas Petukangan, anggota Sekolah Perempuan belajar membuat miniatur kapal Pinisi sebagai simbolisasi perlawanan terhadap ranah publik laki-laki. Dalam perkembangannya, Kelas Petukangan ini kemudian menjadi salah satu usaha ekonomi kolektif mereka. Ketika pandemi COVID-19 terjadi di tahun 2020, mereka juga mengembangkan Radio Komunitas "Sipurennu" untuk membantu pembelajaran sekolah jarak jauh dan menjadi media untuk menghentikan perkawinan anak yang marak terjadi saat pandemi.

Pendekatan yang berbasis konteks-konteks kewilayahan ini masif terjadi di semua wilayah Sekolah Perempuan. Pada saat yang bersamaan, Sekolah Perempuan mulai aktif melakukan pemantauan terhadap kekerasan terhadap perempuan, kebijakan publik, program-program perlindungan sosial, dan mekanisme perencanaan pembangunan. Pemantauan ini dilakukan melalui Audit Gender Berbasis Komunitas (AGBK). Melalui AGBK, Sekolah Perempuan berhasil memetakan masalah-masalah dalam program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SPP PNPM) dan sejauh mana dampak program perlindungan sosial di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, terhadap perempuan miskin. Selain SPP PNPM, Sekolah Perempuan juga telah melakukan pemantauan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI), pemantauan fungsi dan peran Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemantauan ini membuat Sekolah Perempuan semakin dikenal di komunitasnya dan menjadi tumpuan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, berkembanglah Pos Pengaduan Sekolah Perempuan sebagai pusat layanan pengaduan di tingkat desa/kelurahan, hingga saat ini.

Meluasnya Sekolah Perempuan, intensifnya aksi dan advokasi yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan mulai membuat Sekolah Perempuan juga dikenali oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Akhirnya, pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan mereplikasi Sekolah Perempuan. Tahun 2020,

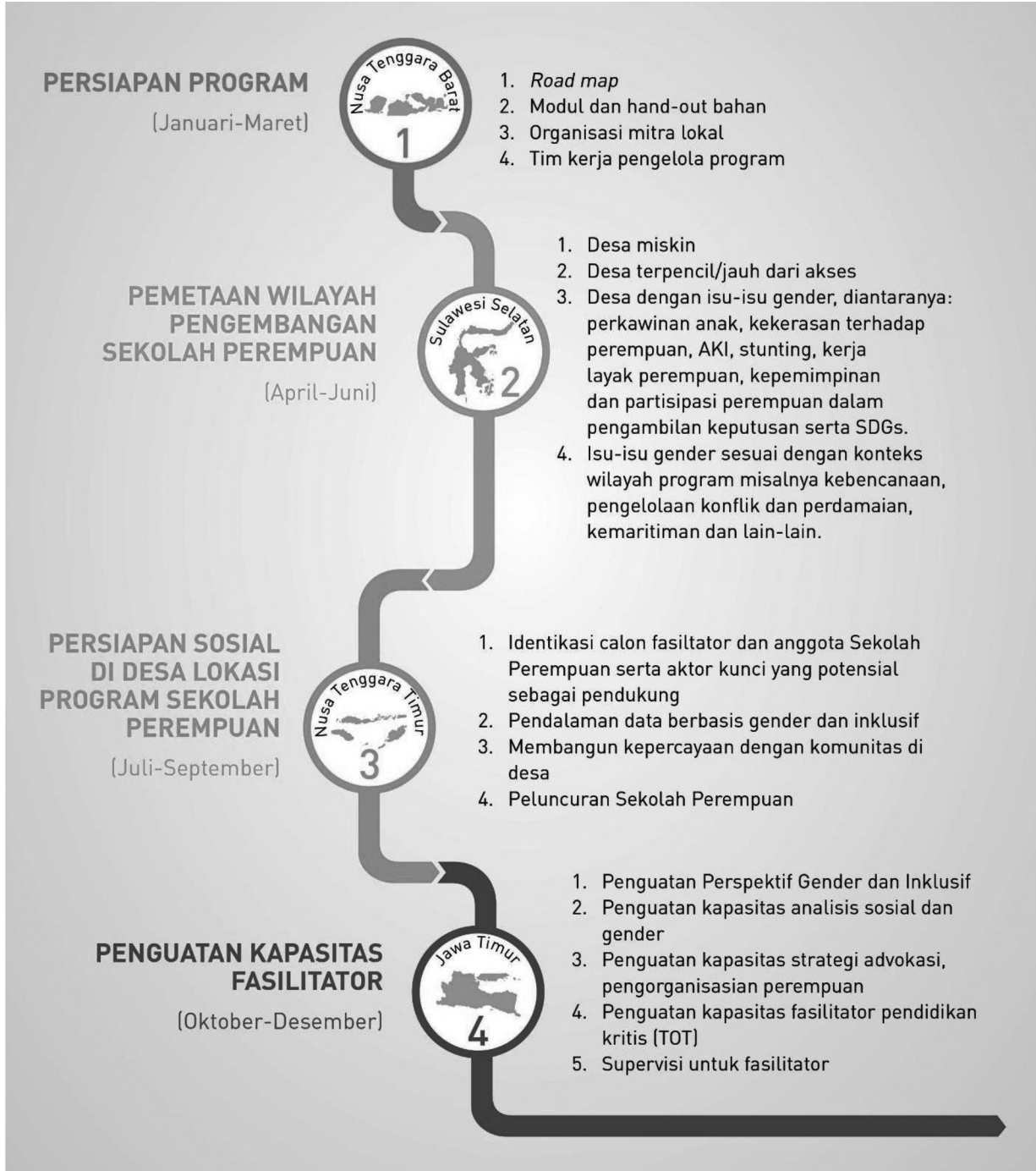
Sekolah Perempuan meluas di desa, kabupaten dan provinsi lainnya. Sampai saat ini, Sekolah Perempuan berkembang di 61 desa/kelurahan di 12 kabupaten/kota di 9 provinsi dengan kurang lebih 5.300 anggota.

Kurang lebih setahun, anggota Sekolah Perempuan secara rutin seminggu atau dua minggu sekali belajar tentang konsep-konsep gender, kepemimpinan perempuan, membedah berbagai isu perempuan dan membangun organisasi perempuan akar rumput. Mereka juga mengikuti kelas-kelas tematik tentang pendampingan kekerasan berbasis gender, pendidikan politik, *livelihood* perempuan, advokasi, tata kelola desa,

dan mekanisme perencanaan pembangunan. Sembari itu, mereka mempraktikkan pengetahuan mereka melalui aksi, advokasi, kampanye, mendirikan usaha-usaha ekonomi, lobi, audiensi, dialog, pendampingan kasus, dan berpartisipasi penuh dalam forum-forum perencanaan pembangunan desa, kecamatan, kabupaten, dan nasional.

Berikut merupakan peta jalan pengembangan Sekolah Perempuan yang dapat memperjelas proses dari penerapan pendidikan kritis feminis untuk memberdayakan perempuan di berbagai aspek kehidupannya.







Gambar 3: Peta Jalan (Road Map) Pengembangan Sekolah Perempuan

Sumber: Peta Jalan (Road Map) Pengembangan Sekolah Perempuan; Model Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan Gender di Semua Aspek Kehidupan, Institut KAPAL Perempuan, Maret 2020.

Meretas Batas Teknokrasi Perencanaan Pembangunan

Pendekatan kesadaran kritis, perspektif gender, dan inklusi sosial yang kuat serta pengetahuan yang dimiliki tentang teknokrasi perencanaan pembangunan merupakan landasan dasar yang digunakan oleh Sekolah Perempuan untuk mulai secara aktif terlibat dan mengawal perencanaan pembangunan di desa mereka.

Mereka mendesakkan dirinya hadir dalam Musrenbang Desa. Hadir dalam Musrenbang Desa bagi perempuan miskin dan marginal bukan perkara mudah. Mereka tidak dipercayai memiliki gagasan untuk pembangunan. Pemerintah desa dan masyarakat juga merasa asing dengan kehadiran mereka dalam forum publik untuk perencanaan pembangunan tersebut. Bahkan di satu wilayah Sekolah Perempuan, mereka tidak diterima

masuk dalam ruangan dan ketika berhasil masuk pun mereka tidak diperbolehkan menandatangani presensi dan menerima konsumsi pertemuan. Selama ini, kelompok perempuan yang hadir dalam Musrenbang Desa selalu direpresentasikan dari organisasi PKK saja.

Ketika Sekolah Perempuan mulai mendapatkan pengakuan dari pemerintah desa sebagai organisasi perempuan desa, Sekolah Perempuan pun diundang secara formal dalam Musrenbang Desa. Usulan-usulan yang terstruktur mulai dibangun agar dapat diadvokasi dengan mudah. Pengumpulan data, perumusan dan penyepakatan usulan, dan penetapan perwakilan Sekolah Perempuan dilakukan untuk menyiapkan Sekolah Perempuan hadir secara bermakna dalam forum tersebut.

Penyediaan data sebagai basis perumusan masalah, lebih mudah bagi Sekolah Perempuan karena Sekolah Perempuan memiliki data yang berasal dari Pos Pengaduan, AGBK, dan Pemetaan Partisipatif Desa. Dalam menyusun usulan-usulan program perencanaan pembangunan, data merupakan aspek krusial karena data dapat memastikan program pembangunan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Sering kali, perencanaan pembangunan desa abai terhadap data, terutama data yang sifatnya partisipatif sehingga program-program pembangunan cenderung diimplementasikan sama dari waktu ke waktu, dari satu periode perencanaan ke periode berikutnya. Data juga memperkuat analisis masalah sehingga menghasilkan usulan-usulan program pembangunan yang lebih tepat.

Dalam proses perumusan usulan, Sekolah Perempuan juga mencoba mengkategorisasi usulannya berdasarkan bidang-bidang pembangunan desa. Cara ini memudahkan pemerintah desa untuk merumuskan dalam nomenklatur program dan anggaran. Meskipun demikian, sering kali program dan anggaran untuk perempuan cenderung dikotakkan pada nomenklatur khusus tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Padahal, urusan perempuan dan anak seharusnya diarusutamakan (*mainstreaming*) dalam semua bidang. Pada konteks inilah, pengawalan usulan-usulan Sekolah Perempuan menjadi penting.

Pengawalan usulan-usulan yang telah didesakkan melalui forum Musrenbang Desa juga dilakukan melalui tim Rencana Kerja Pembangunan Desa atau disebut RKP Desa. Oleh karena itu, Sekolah Perempuan juga mendesak masuk dalam formulasi tim RKP Desa ini. Tantangannya juga berat. Selama ini, tim RKP Desa cenderung diisi oleh aparat desa karena menganggap

bahwa aparat desa lebih paham tentang teknokrasi perencanaan pembangunan. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Sekolah Perempuan mengenai tata kelola desa khususnya perencanaan penganggaran pembangunan, Sekolah Perempuan akhirnya dipercaya untuk terlibat sebagai tim RKP Desa. Tim RKP Desa memiliki kewenangan untuk memastikan usulan-usulan program dari masyarakat sesuai dengan nomenklatur dan menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan. Pada titik inilah, kapasitas kepemimpinan anggota Sekolah Perempuan diuji untuk memberikan argumen tentang urgensi penyelesaian masalah-masalah perempuan di desa.

Proses Memengaruhi Kebijakan Publik yang Berkeadilan Gender dan Inklusif

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik telah menunjukkan dampak signifikan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Proses ini dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Reguler atau dapat disebut Musrenbang Reguler, maupun musyawarah-musyawarah yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, termasuk forum-forum musyawarah adat. Di luar Musrenbang Reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah, musyawarah perencanaan pembangunan yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, sangat beragam. Institut KAPAL Perempuan dan organisasi masyarakat sipil yang menjadi mitra di daerah menyelenggarakan "Musrenbang Perempuan" mulai dari tingkat desa, kabupaten, dan nasional. Di tingkat kabupaten, Musrenbang Perempuan diselenggarakan melalui Forum Musyawarah Daerah dan di tingkat nasional, Institut KAPAL Perempuan dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga secara kolektif menyelenggarakan "Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan". Inisiatif untuk mengawal isu-isu perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal juga dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya. Misalnya, "Musrenbang Tematik" khusus untuk isu pekerja migran oleh Migrant CARE dan khusus untuk isu disabilitas oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB. Selain itu, Aisyiyah juga menginisiasi "Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan" di tingkat desa dan kabupaten, kemudian PEKKA dan KEMITRAAN menyelenggarakan "Diskusi Kampung", "Forum Perempuan Adat", "Forum Pemangku Kepentingan", "Forum Keluarga Waria" dan "Forum Keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum".

Tabel 1. Tahapan Musrenbang dan Inisiasi Masyarakat Sipil

Tahapan Musrenbang Reguler (diselenggarakan oleh pemerintah)	Musrenbang khusus yang diinisiasi oleh masyarakat sipil
	Musrenbang Perempuan di tingkat dusun di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang (KAPAL Perempuan, PEKA PM)
Musrenbang Desa/Musyawahar Desa	Musrenbang Perempuan dan Forum di Tingkat Desa 1. Musrenbang Perempuan di tingkat desa di 6 desa di kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara dan Kupang (KAPAL Perempuan, LPSDM, PEKA PM) 2. Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan (Aisyiyah) 3. Diskusi Kampung (PEKKA) 4. Forum Perempuan Adat (Kemitraan) 5. Forum Keluarga Waria (PKBI) 6. Forum Keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum (PKBI)
Musrenbang Kecamatan	Musrenbang Perempuan dan Musrenbang Tematik di Tingkat Kecamatan 1. Musrenbang Perempuan di tingkat kecamatan (KAPAL Perempuan, LPSDM) 2. Musrenbang Tematik untuk isu disabilitas di tingkat kabupaten/kota (Pusat Rehabilitasi YAKKUM)
Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang Perempuan, Tematik dan Musyawarah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota 1. Musrenbang Perempuan di tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan Gresik (KAPAL Perempuan, LPSDM, KPS2K) 2. Musrenbang Tematik untuk isu disabilitas di tingkat kabupaten/kota (SIGAB) 3. Musrenbang Tematik untuk isu disabilitas di tingkat kabupaten/kota (Pusat Rehabilitasi YAKKUM) 4. Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan (Aisyiyah) 5. Musyawarah Daerah (Pra Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan) di 11 kabupaten/kota (KAPAL Perempuan, LPSDM, YKPM, KPS2K, PEKA PM, PBT, LBH PA Morotai, Bakumdik)
Musrenbang Provinsi	
Musrenbang Nasional	Musyawarah di tingkat Nasional - Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan

Sumber: Diolah oleh Institut KAPAL Perempuan.

Mekanisme Musrenbang Perempuan atau Musrenbang Tematik ini menjadi forum utama bagi perempuan akar rumput untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan pengalaman langsung dan kebutuhan komunitasnya. Beberapa daerah telah mengadopsi hasil musyawarah ini ke dalam kebijakan daerah yang berpihak pada perempuan dan kelompok marginal.

Di beberapa wilayah, perempuan juga memanfaatkan forum adat untuk menyuarakan hak dan kepentingannya. Meskipun forum adat sering kali didominasi oleh laki-laki, keterlibatan perempuan di dalamnya telah menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Beberapa komunitas adat mulai menerima

gagasan kesetaraan gender dan memberikan ruang bagi perempuan dalam pengambilan keputusan. Mereka membuat sejarah baru, menembus benteng patriarki sehingga berhasil menjadi anggota lembaga adat yang selama ini belum pernah ada representasi perempuan.

Dampak Partisipasi Perempuan terhadap Kebijakan, Program, dan Anggaran

Partisipasi Perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik memiliki dampak nyata terhadap kebijakan, layanan publik, ekonomi, budaya, serta pendidikan di komunitas. Dengan menguatnya

keterlibatan perempuan, kebijakan dan pembangunan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal, yang pada akhirnya menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan adil gender. Dampak positif dari partisipasi perempuan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebijakan yang lebih inklusif hingga perubahan sosial yang mendorong kesetaraan gender di tingkat komunitas.

Pertama, partisipasi perempuan telah berkontribusi dalam mendorong pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik, terutama melalui mekanisme khusus seperti Musrenbang Perempuan, yang memungkinkan perempuan mengusulkan program-program berbasis kebutuhan nyata mereka. Dengan adanya ruang partisipasi yang lebih luas, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih sensitif terhadap isu perempuan dan kelompok rentan.

Kedua, melalui kehadiran perempuan dalam perencanaan pembangunan, komunitas dapat mendesak tersedianya layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, seperti layanan pengaduan, informasi, edukasi, penanganan kasus, serta sistem perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Keberadaan Pos Pengaduan di tingkat desa dan sistem rujukan berbasis komunitas telah menjadi contoh konkret bagaimana perempuan berperan dalam memperkuat akses terhadap layanan publik yang lebih inklusif.

Ketiga, partisipasi perempuan juga berkontribusi dalam memperbaiki ketersediaan data gender, yang selama ini masih sering terbatas pada data terpilah laki-laki dan perempuan tanpa menggambarkan situasi yang lebih kompleks. Dengan pendekatan pendataan partisipatif, perempuan dapat memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas yang mereka hadapi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Keempat, dengan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, semakin banyak program yang mendukung *livelihood* perempuan, termasuk akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Keberadaan kelompok ekonomi perempuan di berbagai desa telah membuktikan bahwa program ekonomi yang dirancang dengan perspektif gender tidak hanya meningkatkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai agen perubahan di lingkungannya.

Kelima, partisipasi perempuan di ruang publik juga membawa dampak pada perubahan sosial dan budaya dalam komunitas. Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, norma dan nilai yang selama ini membatasi peran perempuan mulai bergeser menuju komunitas yang lebih terbuka dan setara bagi perempuan dan laki-laki.

Keenam, pendidikan tidak boleh berhenti di usia sekolah. Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan juga membuka peluang bagi pendidikan sepanjang hayat, khususnya bagi perempuan miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pembelajaran formal. Program-program berbasis pendidikan kritis, seperti yang dikembangkan dalam Sekolah Perempuan, telah membuktikan bahwa perempuan dapat terus belajar, meningkatkan kapasitasnya, dan memperjuangkan hak-haknya dalam masyarakat.

Pengalaman Institut KAPAL Perempuan menunjukkan bahwa pendidikan kritis dan pengorganisasian komunitas bagi perempuan miskin dan marginal semakin mampu terlibat dalam perencanaan pembangunan dan forum adat, yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pengalaman anggota Sekolah Perempuan ketika mereka berhasil berperan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa dan adat. Berikut beberapa pengalaman Perempuan yang telah dikumpulkan peneliti untuk menunjang penelitian ini.

Saraiyah adalah Ketua Sekolah Perempuan Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak tahun 2018 terpilih sebagai salah satu Anggota Majelis Krama Adat Desa (MKAD) Desa Sukadana. Saraiyah membuat sejarah, sebagai perempuan pertama di desanya yang duduk di MKAD. Semenjak itulah, Saraiyah duduk bersama pemimpin di MKAD, menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah masyarakat Desa Sukadana termasuk *pembelasan* (pemisahan) dalam kasus-kasus perkawinan anak. (Setiani et al. 2020). Dia harus berjuang dan bersuara di forum musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga kabupaten. Tentu saja dia melewati berbagai perdebatan panjang di setiap forum pertemuan tersebut. Meskipun beberapa peserta musrenbang desa menolak usulannya karena dianggap membela kepentingan warga yang berbeda agama, Saraiyah tetap teguh pada pendiriannya. Ia terus mengupayakan perbaikan jalan di dusun yang mayoritas penduduknya

beragama Hindu. Menurutnya, pembangunan harus berfokus pada mereka yang paling membutuhkan, tanpa memandang latar belakang agama. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil, dengan pemerintah desa menyetujui dan merealisasikan perbaikan jalan di Dusun Kebon Patu, salah satu dusun di Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Demikian juga dengan Klara Tawa, anggota Sekolah Perempuan Desa Noelbaki, NTT. Bersama rekan-rekannya, merintis Musrenbang Perempuan di tingkat desa. Forum ini menjadi sarana strategis bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga dapat memasukkan usulan-usulan pemberdayaan perempuan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Inisiatif ini membawa dampak signifikan, salah satunya adalah lahirnya Peraturan Desa yang mewajibkan keterlibatan 30 persen perempuan dalam Musrenbang. Kebijakan ini kemudian mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, yang pada tahun 2016 mencapai hingga sekitar 53 persen.

Pengalaman Saraiyah, Klara Tawa, dan anggota Sekolah Perempuan lainnya dalam memengaruhi kebijakan publik khususnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan telah mendorong pertama, lahirnya kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Pengalaman kurang lebih 10 tahun ini telah berkontribusi pada disahkannya kebijakan di tingkat desa, daerah, dan perubahan kebijakan nasional. Di Desa Tanah Merah, misalnya, telah diterbitkan empat Peraturan Desa pada tahun 2022 yang secara langsung mengatur tentang partisipasi kelompok marginal, revolusi kesehatan ibu dan anak, pencegahan perkawinan anak, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Di tempat lain, seperti di Desa Sesait di Kabupaten Lombok Timur, Desa Galo-Galo di Kabupaten Pulau Morotai, dan bahkan pada level kabupaten di Lombok Timur, telah diterbitkan kebijakan serupa yang memperlihatkan bagaimana suara perempuan berhasil membentuk arah kebijakan publik yang inklusif. Menariknya, pengaruh ini tidak hanya terbatas pada struktur pemerintahan formal, tetapi juga ke wilayah yang selama ini dianggap sulit dijangkau oleh advokasi perempuan yaitu lembaga-lembaga adat. Lembaga adat di Lombok Utara telah membuka jalan lahirnya beberapa kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Salah satu contohnya *awig-awig* (aturan) di desa yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, dari kebijakan yang lebih inklusif tersebut, pada akhirnya juga menghadirkan berbagai program yang menjawab kebutuhan spesifik kelompok perempuan dan masyarakat marginal. Mulai dari peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia, beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin, bantuan tenaga kesehatan untuk Posyandu Lansia, pelatihan pengembangan ekonomi, seperti pembuatan pakan ternak dan anyaman, pengadaan air bersih bagi penyandang disabilitas, alat bantu untuk disabilitas, hingga sosialisasi Undang-undang TPKS dan upaya pencegahan perkawinan anak. Program-program ini tidak hanya merespon kebutuhan komunitas, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan di tingkat desa. Dalam pembangunan infrastruktur yang sering kali menjadi prioritas utama pembangunan, partisipasi perempuan berkontribusi pada pembangunan jalan di salah satu dusun terpencil di desa di Lombok Utara, pembangunan dermaga ramah perempuan dan anak di wilayah kepulauan di Pangkajene dan Kepulauan, serta penyediaan bidang miring untuk pengguna kursi roda di Poskesdes dan balai desa. Pemerintah desa juga memfasilitasi ruangan layanan untuk Pos Pengaduan Sekolah Perempuan dan Radio Komunitas Sekolah Perempuan.

Ketiga, keberhasilan mendorong program yang lebih inklusif didukung juga dengan keberhasilan penyediaan anggaran, terlihat dalam alokasi anggaran yang cukup tinggi dari dana desa maupun anggaran daerah yang dialokasikan untuk program-program pemberdayaan perempuan. Sejak 2023 hingga 2025, tercatat lebih dari delapan ratus juta telah berhasil dialokasikan untuk usulan yang mereka perjuangkan. Hal ini menunjukkan pengaruh langsung dalam pengambilan keputusan anggaran publik. Advokasi anggaran ini juga, pada sisi lain, mendorong kesadaran pemerintah desa maupun daerah tentang pentingnya memprioritaskan pengalokasian anggaran khusus untuk perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal.

Keempat, perbaikan dalam layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok marginal serta lebih aksesibel. Misalnya, pemerintah desa membangun bidang miring untuk disabilitas dengan kursi roda di Poskesdes, kehadiran Dukcapil di desa untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan, penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dari UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur untuk mendampingi korban disabilitas dalam proses penanganan kasus kekerasan, serta layanan

pemeriksaan kesehatan perempuan, seperti tes IVA dan pap smear gratis. Di beberapa wilayah seperti Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Pulau Morotai berhasil mendorong terbentuknya UPTD PPA yang memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak. Lebih luas lagi, akses terhadap layanan transportasi kesehatan, penyediaan tenaga pengajar di wilayah kepulauan, serta perluasan jangkauan layanan perlindungan sosial merupakan hasil nyata dari keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Sejalan dengan keberhasilan advokasi Sekolah Perempuan dalam perencanaan pembangunan, pengakuan terhadap Sekolah Perempuan sebagai organisasi perempuan akar rumput di desa juga semakin menguat. Lebih dari 50 Sekolah Perempuan tingkat desa telah disahkan oleh pemerintah desa sebagai organisasi perempuan desa. Pengakuan ini membuka ruang yang lebih lebar untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam mempercepat upaya pembangunan yang adil gender. Pada sisi lain, menjadi alat ungkit yang kuat sebagai masyarakat sipil untuk memantau pembangunan atau menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Bukti-bukti berdasarkan pengalaman beberapa tokoh perempuan yang telah disebutkan pada paragraf-paragraf sebelum ini, menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam mekanisme perencanaan pembangunan bukan hanya simbolis, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam kebijakan, alokasi anggaran, serta penguatan layanan publik yang lebih inklusif. Partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan telah membuka jalan bagi pembangunan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Upaya menghadirkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan didorong juga di tingkat nasional. Institut KAPAL Perempuan bersama mitra INKLUSI lainnya menyelenggarakan Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan 2023 dan 2024, yang menjadi ruang bagi perempuan, kelompok disabilitas, dan komunitas marginal untuk menyuarakan aspirasi dalam perencanaan pembangunan. Komitmen ini diterima oleh pemerintah, terutama Kementerian PPPA dan Bappenas, yang menegaskan pentingnya partisipasi perempuan dalam kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Salah satu hasil utama dari musyawarah ini adalah pengaruhnya terhadap RPJPN 2025–2045. Musyawarah ini berhasil diintegrasikan dalam rancangan akhir RPJPN,

termasuk perubahan arah pembangunan Indonesia Emas (IE.14) dari “Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender” menjadi “Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif”. Perubahan ini merupakan hasil advokasi masyarakat sipil termasuk mitra program INKLUSI. Musyawarah ini melibatkan lebih dari 5.000 peserta dari seluruh Indonesia dan menjadi forum strategis bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput. Dalam Munas Perempuan ini, mengusung 9 isu prioritas, termasuk kemiskinan perempuan, pekerja perempuan, penghapusan perkawinan anak, ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan, lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Keberhasilan advokasi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tidak hanya berdampak di tingkat desa dan kabupaten, tetapi juga dalam perubahan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan pembangunan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman mereka. Dengan semakin kuatnya keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, pembangunan yang berbasis kesetaraan dan keadilan sosial dapat lebih mudah terwujud.

Mengatasi Kesenjangan Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Asesmen yang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan KAPAL Perempuan pada tahun 2024 di 262 kabupaten/kota menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan, anak, dan kelompok disabilitas dalam Musrenbang masih rendah. Meskipun ada regulasi yang mendorong inklusivitas dalam perencanaan pembangunan, perempuan masih menghadapi hambatan dalam berpartisipasi secara bermakna.

Hasil asesmen ini mengungkapkan beberapa masalah utama. Pertama, kehadiran perempuan dalam musrenbang masih rendah dibandingkan laki-laki dan jika hadir keterwakilannya mereka didominasi oleh anggota PKK. Meskipun PKK juga merupakan bagian dari komunitas desa dan dapat memahami persoalan setempat, keterlibatan akar rumput—yang mengalami langsung berbagai persoalan sistemik di

tingkat komunitas—masih terbatas. Kedua, alasan menghadirkan perempuan dalam Musrenbang masih bersifat gender netral tanpa upaya khusus untuk memberdayakan perempuan. Karena alasan yang dipakai adalah gender netral, maka siapa saja yang mampu baik laki-laki maupun perempuan yang akan diundang. Pemerintah daerah cenderung mengundang peserta berdasarkan kapasitas individu, bukan dengan memastikan adanya kuota khusus perempuan. Bahkan, di beberapa daerah keterwakilan perempuan dianggap tidak terlalu penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Ketiga, meskipun ada usulan untuk pemberdayaan perempuan, penanganan perkawinan anak, dan kekerasan seksual, beberapa daerah masih membatasi usulan perempuan pada hal-hal yang bersifat simbolis seperti seragam PKK, bahkan beberapa kabupaten bahkan tidak ada usulan untuk program perempuan.

Hasil asesmen ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan diundang dalam Musrenbang, keterlibatan mereka sering kali tidak bermakna. Fraser menegaskan bahwa dalam masyarakat yang terstratifikasi, ruang publik bukanlah ruang netral, melainkan sistem yang telah terstruktur sedemikian rupa sehingga menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan yang lain. Dalam konteks Musrenbang, perempuan hanya diundang secara simbolis tanpa mekanisme yang memastikan mereka memiliki pengaruh dalam keputusan pembangunan. Hal ini sejalan dengan tipologi partisipasi yang dikemukakan oleh Cornwall. Perempuan dan kelompok marginal lainnya sering kali masih bersifat tokenistik (simbolis), bukan partisipasi bermakna (*interactive participation*). Perempuan sering kali hanya menjadi peserta pasif dalam forum formal tanpa akses terhadap proses pengambilan keputusan yang sesungguhnya (Cornwall 2008).

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti pengambilan keputusan dalam keluarga, peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan kritis seperti yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan; peningkatan kuota partisipasi perempuan dalam pembangunan; penguatan jaringan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung advokasi kebijakan yang lebih inklusif; serta integrasi perspektif GEDSI dalam perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal. Dengan strategi ini, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dapat meningkat secara signifikan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat.

Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Budaya patriarki masih menjadi faktor utama penghambat. Perempuan sering kali tidak dianggap sebagai pengambil keputusan yang sah dalam ruang publik termasuk dalam Musrenbang. Sementara itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan membuat banyak perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam forum pengambilan keputusan. Minimnya kebijakan inklusif yang mendukung keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan memperburuk situasi. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memastikan keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan.

Budaya patriarki yang mengakar dalam struktur sosial menciptakan habitus yang menghambat partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu, dalam karyanya *Masculine Dominant*, mengembangkan konsep habitus, yaitu pola berpikir, bertindak, dan merasakan melalui pengalaman sosial yang terus menerus diproduksi. Habitus ini bukan sekedar kebiasaan individu, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara individu dan struktur sosial dalam jangka panjang (Bourdieu 2001). Hal yang sama dijelaskan oleh Bhasin, patriarki membatasi perempuan dengan menempatkan mereka dalam ranah domestik dan menjauhkan mereka dari ruang publik dan politik. Dalam sistem patriarki, perempuan yang berani melampaui batas gendernya kerap kali menghadapi stigma dan resistensi, sehingga partisipasi mereka dalam forum pengambilan keputusan dan pembangunan masih sifatnya simbolis dan tidak berdampak pada kebijakan yang dihasilkan (Bhasin 1993).

Di sisi lain, strategi peningkatan partisipasi perempuan juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Rendahnya pemahaman tentang pendidikan sepanjang hayat bagi perempuan dewasa, persepsi bahwa pendidikan kritis tidak sejalan dengan sistem pendidikan formal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan untuk mendukung program pendidikan kritis. Selain itu, resistensi sosial terhadap pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan masih kuat, ditambah dengan stigma yang dihadapi perempuan yang aktif bersuara di komunitasnya.

Minimnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan kritis bagi perempuan juga menjadi hambatan signifikan. Kebijakan pendidikan nasional masih berfokus pada pendidikan formal, sementara pendidikan masyarakat cenderung bersifat jangka

pendek dan berbasis keterampilan praktis. Hal ini menyebabkan aspek kesadaran kritis—yang dikembangkan melalui Sekolah Perempuan—kurang mendapatkan dukungan kebijakan maupun pendanaan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan advokasi yang lebih kuat agar pendidikan kritis bagi perempuan dapat diakui dan diintegrasikan dalam sistem pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penguatan jaringan solidaritas di tingkat komunitas menjadi strategi penting dalam mendukung perempuan yang ingin terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi perempuan untuk berbicara dan berpartisipasi, maka kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan benar-benar mencerminkan kebutuhan semua kelompok masyarakat.

Penutup

Relevansi atau implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih mendukung partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Integrasi pendekatan GEDSI dalam kebijakan daerah, penguatan kapasitas perempuan dan kelompok marginal lainnya melalui pendidikan kritis, serta advokasi kebijakan yang lebih inklusif harus menjadi strategi utama dalam memastikan suara perempuan, terutama yang berasal dari kelompok marginal dapat didengar dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Lebih jauh, model pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan perlu diadaptasi oleh pemerintah daerah maupun nasional agar semakin banyak perempuan dan kelompok marginal yang terlibat dalam ruang-ruang publik serta dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan individu tetapi juga memperkuat demokrasi yang partisipatif dengan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi pendidikan kritis ke dalam kebijakan pendidikan kritis ke dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas bagi pemerintah guna mendorong partisipasi yang lebih luas dan bermakna dari perempuan dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Namun, dari pengalaman KAPAL Perempuan mendorong pemerintah mengadaptasi model-model pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan,

adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah sering kali tidak mengakomodasi praktik dari keseluruhan modelnya, bahkan cenderung meninggalkan konsep dan konteks yang melatarbelakangi model pemberdayaan perempuan tersebut. Dalam konteks Sekolah Perempuan yang dilatarbelakangi oleh ideologi pendidikan kritis feminis, kapasitas pemerintah dalam mengintegrasikan ideologi ini, masih sulit. Selain itu, keterbatasan anggaran juga sering kali menjadi hambatan teknis. Jika implementasinya tidak dapat dikawal dengan baik, pengaruhnya tidak pada gradasi kualitasnya saja tetapi berisiko diinterpretasikan secara berbeda dan alih-alih memperkuat proses domestikasi perempuan. Pada dasarnya, keberhasilan mendorong proses-proses adaptasi menunjukkan upaya mengembalikan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan pemberdayaan perempuan yang responsif gender. Namun, dibutuhkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap pemenuhan kesetaraan gender dan keadilan gender. Oleh karenanya, menjadi penting organisasi masyarakat sipil dan pemerintah membangun platform bersama dan bekerja bersama.

Meluasnya Sekolah Perempuan di berbagai tempat, komunitas, atau daerah memberikan pembelajaran menarik, khususnya untuk melihat bagaimana pendekatan pemberdayaan perempuan, melalui Sekolah Perempuan, ini dapat merespon berbagai konteks yang ada dan terus berubah. Seperti yang dijelaskan pada bagian awal bahwa perempuan ada dalam keragaman identitas dan kompleksitas kehidupan sosialnya, maka konsep dan metodologi pendidikan kritis feminis yang diterapkan pada Sekolah Perempuan perlu membuka ruang-ruang untuk menyesuaikan dan responsif dengan situasi yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu terutama menguatnya budaya patriarki dan konservatisme agama.

Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah edukator Sekolah Perempuan. Prasyarat Edukator Sekolah Perempuan adalah memiliki perspektif gender dan pluralisme, memiliki komitmen dan dedikasi pada gerakan sosial dan gerakan perempuan, serta daya kepemimpinan perempuan yang kuat. Selain itu, dibutuhkan ketangguhan untuk melakukan pengorganisasian rakyat dalam jangka waktu yang panjang. Pengorganisasian rakyat, terutama perempuan, membutuhkan keberanian karena yang ditanggung oleh para edukator adalah isu-isu sensitif dan berisiko dianggap mengubah tatanan sosial. Di tengah menyempitnya ruang-ruang demokrasi, risiko, dan ancaman yang tinggi, semakin sulit dan jarang

menemukan ketertarikan, khususnya orang-orang muda, pada isu-isu perubahan sosial, apalagi dalam melakukan pengorganisasian rakyat. Dalam situasi ini, maka kaderisasi anggota Sekolah Perempuan dibutuhkan untuk menciptakan edukator-edukator Sekolah Perempuan dari Sekolah Perempuan itu sendiri. Perubahan sosial, sering kali terjadi tidak dalam waktu pendek. Edukator Sekolah Perempuan yang bersumber dari komunitas itu sendiri dapat terus menjaga proses menuju perubahan sosial tersebut. Pada bagian lain, KAPAL Perempuan perlu memastikan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi para edukator Sekolah Perempuan. Dengan demikian, perjuangan untuk menggeser perempuan dari pinggiran ke pusat pengambilan keputusan bukan hanya tentang kehadiran mereka di ruang-ruang diskusi, tetapi juga tentang memastikan bahwa suara, pengalaman, dan kebutuhan mereka benar-benar menjadi bagian dari agenda pembangunan yang berkeadilan gender dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Arivia, G. 2018. *Filsafat Berperspektif Feminis*. YJP Press, Jakarta, hlm. 109.
- Bhaiya, A. dan Menon-Sen, K. 1996. "Feminism Training: Percept and Practices". Unpublished, hlm. 3.
- Batliwala, S. 2010. *Feminist Leadership for Social Transformation: Clearing the Conceptual Cloud*. CREA: New Delhi.
- Bhasin, K. 1993. "What is Patriarchy?". Kali for Women: India, hlm. 1–5.
- Bourdieu, P. 2001. "Masculine Domination". Diterjemahkan Richard Nice. Polity Press, hlm. 8–9.
- Badan Pusat Statistik. 2023. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin".
- Cornwall, A. 2008. "Unpacking 'Participation' Models, meaning and practices". King's College: London, hlm. 270–272.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Dye, T. R. 2016. "Understanding Public Policy" Fifteenth Edition. Pearson Education, Inc.: New Jersey, USA.
- Faqih, M. et al. 2000. *Pendidikan Populer; Membangun Kesadaran Kritis*. ReaD Books: Yogyakarta.
- Fraser, N. 1990. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy". Duke University Press: USA, hlm. 63–68.
- Freire, P. 1985. *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES: Jakarta.
- INKLUSI. 2024. "Tidak Ada Seorangpun yang Tertinggal; Panduan Pengarusutamaan GEDSI dan Interseksionalitas untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif". Belum dipublikasikan.
- KPPPA., KAPAL Perempuan. 2024. *Laporan Asesmen Dasar tentang Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Kabupaten/Kota*. KPPPA: Jakarta.
- Kumurur, V. A. 2010. *Pembangunan Kota dan Kondisi Kemiskinan Perempuan*. Unsrat Press: Manado.
- Longwe, S. H. 1995. *Women's Empowerment Framework*. Lusaka: Zambia.
- Muchtar, Y. dan Misiyah. 2005. *Modul Pelatihan untuk Menumbuhkan dan Meningkatkan Sensitivitas Keadilan Gender*. KAPAL Perempuan: Jakarta.
- Muchtar, Y. 2006. *Modul Pendidikan Adil Gender (PAG) untuk Perempuan Marginal*. KAPAL Perempuan: Jakarta, hlm. 42–48.
- Muchtar, Y. et al. 2010. *Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan Dalam Membangun Kebijakan Publik di Komunitas: Studi Kasus di Jeneponto (Sulawesi Selatan) dan Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat)*. KAPAL Perempuan: Jakarta.
- Parker, L. (Ed.). 2005. *The Agency of Women in Asia*. Marshall Cavendish Academic: Singapore.
- Setiani, E. et al. 2020. *Daya Perempuan Akar Rumput: Kepemimpinan Perempuan untuk Perubahan*. KAPAL Perempuan: Jakarta, hlm. 54–72.
- Sunardi, St. 1998. *Mencari Profil Pendidikan Kritis*. KAPAL Perempuan: Jakarta.
- Suryakusuma, J. 2011. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Komunitas Bambu: Depok.